

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- , 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat – Surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Mandarmaju. Bandung.
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas. Makassar.
- , 2020. *Memaknai Kepemerintahan yang Baik : Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah*, Phinatama Media. Makassar
- A. Siti Soetami. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (cetakan ke enam). Refika Aditama. Bandung.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum. Yogyakarta.
- CF Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. (terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*). Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, (Edisi Pertama). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- H Ishaq. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani. 2017 *Penerapan Penelitian Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Press. Jakarta
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu PerUndang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus (ed). 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. (Cetakan: Ke-1). Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Jazim Hamidi dkk. , 2011. *Opti Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. PT.Prestasi Pustakaraya Indonesia. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2001. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. the Habibie Center. Jakarta.
- , 2004. *Mahkamah Konstitusi fenomena Hukum Tata Negara abad XX*. (cetakan satu). Konsorium Reformasi Hukum Nasional. Jakarta Pusat.
- , 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII PRESS. Yogyakarta.
- , 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- , 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT. Buana Ilmu Populer (BIP). Jakarta.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

- , 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Maria Farida Indarti S. 1998. *Ilmu PerUndang-Undangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2007. *Ilmu PerUndang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mardian Wibowo. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Maruar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwati Riza. 2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. As Publishing. Makassar.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad Abdul kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Edisi ke-1 (Cet.3). Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardian Wibowo. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. (Cetakan Kelima). Kencana. Jakarta.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PUKAP. Makassar.

- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soenobo Wirjosoegito. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sukardi. 2016. *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Gentha Publishing. Jakarta.
- Tanto Lailam. 2017. *Teori & Hukum PerUndang-Undangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yuzuru Shimada, Bhima Yudhistira Adhinegara, dkk. 2018. *Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi (Membaca Momentun 20 Tahun Reformasi Indonesia)*. CV. AURA. Bandar Lampung.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Ed. 1 Cet. 3). Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan)*. Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal

- Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kualitas Produk Hukumnya (Kajian Perda tentang Pajak dan Retribusi di Sulawesi Selatan)*. Jurnal Ilmu HUKUM Amannagappa, Vo. 13, Nomor 2 Juni 2005.
- Angreime Igir, *Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017.
- Arifuddin N. *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah*. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 22, No. 1 Mei 2020.
- Efendi. *Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 51, No. 1, Juni 2017.

- Eka NAM Sihombing. *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017.
- Jefri S. Pakaya. *Redesain Sistem Pengujian Peraturan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14 No. 1. Maret 2017.
- Jorawati Simarmata. *Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Vii/2009)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.
- Kevin Angkouw. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Lex Administratum. Vol. II. No.2. April-Juni 2014.
- Mahmuzar, *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2 (2020): 302-316
- Maruar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, (Agustus 2010), hal.14
- Muhammad Ishar Helmi. *Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 1. 2019.
- Muhammad Reza Winata Dkk. *Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 7 No. 3. Desember 2018.
- Ni'matul Huda. *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan*. Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 januari 2006.
- Ni'matul Huda. *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008.
- Nurul Qamar. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. I, No. 1. November 2012.
- Rahmat Qadri Nasrun. *Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3. No.1 April 2019.

Saldi Isra. *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 4, No. 1. Maret 2015.

Safi'. *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundangan-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*. Jurnal Rechtidee. Vol. 11 No. 2. Desember 2016.

Yoyon M. Darusman. *Tinjauan Yuridis pelaksanaan pengujian perundang-undangan terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang ratifikasi atas konvensi internasional di bidang Haki*). Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Vol. 1, No. 1. Oktober 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang NRI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sumber Lainnya

Skripsi Arief try Dhana Jaya. *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan di Kabupaten Muna*, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 2017.

Tesis Fatimatuz Zahro. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PPU-XI/2013*. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Sunan Ampel.

Tesis Khelda Ayunita. *Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Judicial Review Dan Executive Review*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

Tesis I.G.E. Budiputra. *Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Presiden & Peraturan Menteri Dalam Negeri*. PPS Universitas Udayana Bali. 2015.

Disertasi Astim Riyanto. *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Universitas Padjajaran. Bandung. 2006.

Disertasi A. Hamid S. Atamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Suatu*

Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV). Universitas Indonesia.

Makalah Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945.*

<https://tirto.id/mendagri-tak-lagi-berwenang-batalkan-perda-bermasalah>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

<https://www.mahkamahagung.go.id/>, struktur organisasi Mahkamah Agung RI, (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2020), diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2010.pdf> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kilas Balik Pengabdian Mahkamah Agung RI*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2020), diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4d0c4322afe/pencabutan-perda-lewat-perpres--simak-putusan-mk-ini>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

Hukumonline.com, *Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia*, 2012. Diakses Pada tanggal 22 Agustus 2020.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial-review-di-indonesia>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Daftar Perda/ Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/ Revisi, 2016.

Sistem Peradilan Di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.